



Model Pemberdayaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Hutan (Studi Kasus Desa Cupak, Kabupaten Jombang)

Lucas Magalhaes

Lucas Magalhaes; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, Jl. Wahid Hasyim 141, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2020-06-12

Received in revised form 2020-07-14

Accepted 2020-08-03

Kata kunci:

Masyarakat Hutan,
Pemberdayaan,
Kesejahteraan.

Keywords:

Forest Community,
Empowerment, Welfare.

How to cite item:

Lucas Magalhaes. (2020).

Model Pemberdayaan

Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Hutan (Studi

Kasus Desa Cupak,

Kabupaten Jombang).

Journal of Regional

Economics Indonesia, 1(2).

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat deforestasi hutan tertinggi di dunia. Persoalan paling berat adalah dampaknya terhadap tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Padahal, lebih dari tiga perempat penduduk di Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Persoalan tersebut telah mencetuskan beragam program untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sekaligus mempunyai dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Tetapi, berbagai temuan empiris justru menunjukkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan seringkali mengalami kegagalan akibat model pendekatan yang tidak adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan permodelan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendekatan deskriptif kualitatif, ditemukan bahwa model peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: (i) adanya program pemberdayaan yang mampu mengkoneksikan antara sumberdaya lokal dengan pasar potensial; dan (ii) adanya kemampuan untuk mengelola kelembagaan masyarakat lokal. Kedua faktor tersebut berdampak positif dengan perubahan karakter masyarakat hutan yang produktif. Hasil temuan mampu memberikan inspirasi mengenai model peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan mampu mengakomodasi karakter lokal.

Abstract

Indonesia is one of the countries with the highest rates of deforestation in the world. The most serious problem is its impact on the high level of poverty in communities around the forest. In fact, more than three quarters of the population in Indonesia depend on forest products for their livelihoods. This problem has sparked a variety of programs to achieve sustainable forest management, while at the same time having a significant impact on the welfare of forest communities. However, various empirical findings actually show that efforts to improve the welfare of forest communities often fail due to non-adaptive approaches. This study aims to find the right modeling in order to improve the welfare of forest communities. Based on the results of interviews with a qualitative descriptive approach, it was found that the model for improving the welfare of forest communities was influenced by two factors, namely: (i) the existence of an empowerment program that was able to connect local resources with potential markets; and (ii) the ability to manage local community institutions. These two factors have had a positive impact on changes in the character of productive forest communities. The findings are able to provide inspiration regarding a model for improving the welfare of forest communities able to accommodate local characters.

1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat deforestasi hutan tertinggi di dunia, dimana tingkat deforestasi pada tahun 2000-2003 sebesar 10.000 km² dan menjadi dua kali lipat atau mencapai 20.000 km² di tahun 2016-2017 (WALHI, 2016). Implikasi paling berat dari laju deforestasi adalah semakin berkurangnya manfaat kawasan hutan bagi

* Lucas Magalhaes.

© 2020 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

kepentingan ekologis, sosial budaya, dan ekonomi. Dampak paling kontraproduktif dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi adalah tingginya tingkat kemiskinan, terutama yang dirasakan masyarakat sekitar hutan. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan disebabkan semakin terbatasnya aksesibilitas terhadap sumberdaya bagi mata pencaharian.

Persoalan deforestasi dan tingginya tingkat kemiskinan telah mencetuskan beragam program dari berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sekaligus mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Tetapi, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus yang mampu menurunkan tingkat deforestasi bukan persoalan yang mudah. Berbagai temuan membuktikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan seringkali mengalami kegagalan akibat model pendekatan yang tidak adaptif. Faktor determinan kegagalan diakibatkan rendahnya penghargaan terhadap hak-hak masyarakat sekitar hutan, penatagunaan hutan yang tidak efektif, dan model pemberdayaan yang belum memungkinkan masyarakat hutan dalam mengoptimalkan potensi hasil hutan.

Kasus berbeda ditemukan di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dimana masyarakat hutan mampu mengelola industri skala rumah tangga berbasis tanaman produktif sekitar hutan. Kasus di Desa Cupak menunjukkan keberhasilan, dimana desain pemberdayaan berhasil dilakukan dan mampu merubah karakter masyarakat yang sebelumnya konservatif menjadi produktif dengan berprinsip keberlanjutan. Tanaman produktif yang dimaksud adalah tanaman pandan sebagai bahan baku anyaman pandan. Desa Cupak merupakan salah satu desa di Kabupaten Jombang sebagai penghasil tanaman pandan tertinggi di Jawa Timur.

Tanaman pandan merupakan jenis tanaman naungan skala rendah sebagai bahan baku pokok industri anyaman pandan. Pengembangan industri skala rumahan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang sebelumnya nirdaya menjadi berdaya. Proses tersebut mampu dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan di Desa Cupak melalui prosedur pemberdayaan yang unik berbasis karakteristik lokal. Kegiatan yang dilakukan mampu membantu kelestarian hutan melalui skema ketergantungan antara masyarakat hutan dengan kebutuhan akan luasan

dan rehabilitasi lahan hutan. Kasus di Desa Cupak tersebut mampu memberikan inspirasi mengenai model peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan yang selama ini sukar dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami model pemberdayaan masyarakat desa hutan yang telah berhasil dilakukan di Desa Cupak, Kabupaten Jombang.

2. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan mengeksplorasi model peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif sangat relevan dengan tujuan penelitian dan pengembangan model analisis, yang betul-betul dibutuhkan penelitian lapang. Penelitian kualitatif sangat diperlukan jika penelitian yang dilakukan dibutuhkan interpretasi yang tepat dalam menjelaskan fenomena atau sebuah kasus. Penelitian lapang melalui metode kualitatif diperlukan jika penelitian yang bersangkutan membutuhkan kedalaman untuk menemukan, mendeskripsikan dan mengeksplorasi kasus penelitian untuk tujuan melihat model pelaksanaan atas sebuah kasus. Selain itu, jika penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengadopsi keberhasilan program, maka penelitian kualitatif menjadi metode yang paling tepat digunakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Dampaknya bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Hutan

Desa Cupak terkenal sebagai desa pinggir hutan di Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang yang mampu menghasilkan kemandirian industri anyaman pandan dengan memanfaatkan daun tanaman pandan sebagai bahan baku utama industri. Sebelum tahun 2017 dan setelahnya, tingkat perbedaan harga antara daun pandan basah dan kering cenderung mempunyai komposisi yang selalu sama. Perhitungan hasil produksi didasarkan pada pengurangan dengan total biaya usahatani, yang secara keseluruhan mencakup delapan jenis biaya, yaitu: (i) sewa lahan konsesi; (ii) persiapan lahan; (iii) pembelian bibit; (iv) pemupukan; (v) pemeliharaan; (vi) pemanenan; dan (vii) transportasi untuk pengangkutan

hasil panen. Secara keseluruhan, biaya usahatani petani pandan pada dasarnya tidak terdapat unsur biaya tenaga kerja. Dari total biaya usahatani, maka dapat dibandingkan antara total biaya (TC) dan margin antara petani yang menjual daun pandan basah dan yang mampu memproduksi secara kering untuk bahan baku industri. Perbandingan ini dapat menjadi dasar analisa tingkat perbedaan pendapatan antara petani non produktif (menjual daun pandan basah) dengan petani yang mempunyai jiwa kewirausahaan (sekaligus sebagai produsen anyaman pandan).

Simulasi pendapatan mencerminkan bahwa tingkat perbedaan antara petani yang menjual daun pandan basah dengan kering mempunyai tingkat margin yang sangat tinggi. Pada tahun 2017, perbedaan antara TC dan margin pada daun pandan basah sangat jauh, sehingga komposisinya hampir 80 persen disumbang oleh TC. Berbeda dengan daun pandan kering sebagai bahan baku industri, dimana perbedaan antara TC dan margin tidak terlalu jauh. Untuk tahun 2017, komposisi margin pada daun pandan basah berangsur-angsur sudah tinggi, yang disebabkan oleh harga daun pandan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan harga juga sangat dirasakan oleh petani yang memproduksi anyaman pandan, yang mengakibatkan komposisi margin lebih mendominasi daripada TC, sehingga keuntungan rumah tangga yang memproduksi anyaman pandan bisa berlipat-lipat. Tren pada tahun 2017 ini diikuti oleh tahun 2018, dengan tren yang mirip, dan menjadikan rumah tangga produsen anyaman pandan mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi dibandingkan rumah tangga (petani) yang menjual daun pandan dalam bentuk basah. Temuan ini menguatkan proposisi awal bahwa upaya petani pandan untuk mengolah menjadi produsen anyaman pandan merupakan jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan yang sebelum tahun 2017 masih konservatif (belum produktif).

Simulasi usahatani dan tingkat pendapatan (margin) yang diperoleh petani pandan sebagaimana penjelasan di atas mengantarkan pada temuan penting, bahwa pasca tahun 2017, masyarakat hutan di Desa Cupak mengalami perubahan karakteristik dari konservatif menuju progresif. Pada tahun 2017, dilakukan pengembangan program

pemberdayaan yang mengarahkan potensi masyarakat hutan agar terkoneksi dengan pasar industri kerajinan potensial. Kasus ini menjadi menarik karena kemampuan program dalam merubah karakter masyarakat yang konservatif dan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat hutan tanpa mengorbankan kelestarian sumberdaya hutan. Perubahan karakter masyarakat hutan telah berimplikasi pada insentif masyarakat hutan untuk terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya tanaman pandan. Artinya, upaya konservasi hutan akan terus meluas seiring dengan upaya ekstensifikasi budidaya tanaman pandan.

Masyarakat hutan menyadari bahwa terus meningkatnya permintaan pasar industri kerajinan selama ini masih belum diimbangi dengan jumlah pasokan penawaran, yang menyebabkan masyarakat hutan di Desa Cupak terus melakukan ekstensifikasi lahan yang dikoordinasikan dengan pihak Perhutani. Bagi Perhutani, pengajuan lahan konsesi dari masyarakat hutan akan sangat menguntungkan, terutama dalam menjaga keamanan pohon tegakan sebagai lingkungan pendukung tanaman pandan. Penurunan pembalakan liar merupakan dampak dari model budidaya dari masyarakat hutan sebagai strategi Perhutani menjaga hutan dari pendekatan represif diubah ke arah yang produktif. Perhutani mengubah strategi dengan pendekatan persuasif, dimana masyarakat hutan di Desa Cupak digandeng dan dilibatkan dalam menjaga keamanan hutan.

4. Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Hutan

Kasus di Desa Cupak memberikan makna penting, bahwa kemiskinan masyarakat hutan sangat lekat dengan karakteristik sosial dan individu yang masih konservatif karena kondisi spasial yang sangat terbatas. Hasil penelitian primer menemukan akar masalah yang dihadapi masyarakat hutan di Desa Cupak dan dampaknya pada sifat konservatif dan kondisi kemiskinan. Penyebab utama dari kemiskinan dikarenakan rendahnya keinginan petani (masyarakat hutan) untuk mengolah daun pandan sebagai bahan baku industri anyaman pandan, yang dalam kasus ini dikategorikan sebagai karakter sosial yang konservatif. Sifat konservatif masyarakat hutan disebabkan setidaknya karena tujuh faktor, seperti: (i) mempunyai keterbatasan akan informasi pasar; (ii) mempunyai jiwa

kewirausahaan yang rendah; (iii) mempunyai basis jaringan yang sedikit; (iv) hanya hidup berkulat di area hutan tempat mereka tinggal; (v) pengetahuan mereka yang terbatas akibat rendahnya jenjang pendidikan maupun faktor pertemanan; dan (vi) rata-rata sangat sensitif terhadap biaya tambahan pasca panen akibat rendahnya dalam menanggung risiko usaha.

Hasil wawancara secara mendalam lebih menspesifikasi persoalan sifat konservatifme pada masyarakat hutan di Desa Cupak (sebelum tahun 2017) akibat dua aspek persoalan, yaitu: (i) pertama adalah persoalan karakteristik masyarakat; dan (ii) kedua adalah persoalan sistem sosial yang tercipta di lingkungan masyarakat hutan.

1. Karakteristik masyarakat disebabkan oleh dua faktor persoalan, yaitu: (i) persoalan demografis; dan (ii) kedua adalah persoalan sosial. Persoalan demografis disebabkan oleh: (i) rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat; dan (ii) masih lemahnya rata-rata tingkat pengetahuan pasar. Kedua persoalan tersebut menyebabkan rendahnya daya inovasi dan daya juang yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara persoalan kondisi sosial disebabkan oleh dua persoalan, yaitu: (i) karakter masyarakat yang bercorak strukturalis komunalis; dan (ii) rendahnya kultur dalam kegiatan kelembagaan masyarakat. Strukturalis komunalis adalah budaya lokal yang ditentukan oleh lingkungan dan masyarakat sekitar yang cenderung strukturalis. Pengertian strukturalis adalah sifat yang turun temurun yang didasarkan pada hierarki nilai-nilai. Sayangnya, karakteristik sosial yang melekat pada masyarakat hutan di Desa Cupak cenderung sulit mengadopsi nilai-nilai produktif. Dampaknya, rata-rata masyarakat tidak mempunyai target dalam berusahatani, serta mempunyai daya juang yang lemah untuk terjun dalam kegiatan pasca panen.
2. Persoalan sistem sosial disebabkan oleh dua faktor persoalan, yaitu: (i) akibat struktur pasar; dan (ii) akibat tingginya kebutuhan uang tunai rumah tangga petani. Kedua persoalan tersebut berasal dari sistem sosial yang tradisional, dan menjadikan masyarakat (petani) sangat kurang mempunyai ketangguhan dalam mengambil risiko pada proses pengolahan pasca-panen. Dengan kata lain, jiwa kewirausahaan masyarakat hutan pada dasarnya masih sangat

rendah. Karakteristik demografis yang melekat pada masyarakat hutan yang terisolasi mempunyai dampak signifikan terhadap perilaku mereka dalam melakukan kegiatan produktif. Dari sisi spasial, lokasi yang sangat jauh dari pusat perkotaan dan pemerintahan menjadikan masyarakat hutan masih kedinginan terhadap informasi dan pengetahuan.

Persoalan karakter yang konservatif pada rata-rata masyarakat miskin (terutama banyak dijumpai pada masyarakat hutan) sebenarnya merupakan isu lama, namun seringkali tidak bisa ditangkap dalam merumuskan program pengentasan kemiskinan. Menurut Ana & Sefa (2012), selama ini program pengentasan kemiskinan di banyak negara berkembang jarang mengadopsi tata kelola yang adaptif, sehingga berdampak pada belum meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat miskin. Kesulitan yang paling sering dihadapi adalah upaya untuk mengklasifikasikan karakteristik masyarakat sasaran, yang bisa berpotensi sebagai faktor penghambat efektivitas program. Menurut Setiajiati, et.al (2017), kelemahan mendasar program pengentasan kemiskinan yang menyasar di kawasan *remote area* terdapat pada rendahnya upaya membangun mentalitas masyarakat sasaran yang rata-rata kurang berorientasi keluar (*forward looking*).

Sementara Rosyidatuzzahro, et.al (2019) berpendapat bahwa rata-rata program yang dilaksanakan gagal dalam meningkatkan daya inovasi masyarakat miskin sasaran karena tidak adanya mindset pertumbuhan ekonomi rumah tangga, yang selama ini lebih disebabkan akibat penghindaran risiko-risiko akibat beban biaya transaksi. Kesemua pendapat ini memperkuat argumentasi Soepijanto, et.al (2013), bahwa kelemahan mendasar program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh kegagalan dalam memperbaiki karakteristik masyarakat sasaran yang rata-rata sangat konservatif sehingga menjadikan mereka sebagai golongan yang sulit berkembang.

Pelaksanaan program pemberdayaan pada masyarakat hutan rata-rata mengalami kebuntuan akibat tidak adanya upaya untuk membuka akses informasi keluar, terutama dari segi pemasaran, jaringan, dan beragam stok pengetahuan eksternal yang notabene bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat (Tampubolon, 2020). Padahal berdasarkan temuan primer di Desa Cupak, masyarakat hutan pada

dasarnya tipikal masyarakat yang sangat terbuka terhadap arus informasi dari luar, baik yang terkait dengan usahatani, proses pengolahan hasil panen, dan pemasaran. Namun, transfer pengetahuan dari luar (eksogen) selama ini sangat jarang dilakukan dalam tata kelola program pengentasan kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh temuan Soepijanto et al, (2013), bahwa rata-rata program pengentasan kemiskinan pada masyarakat hutan gagal dalam mengkoneksi potensi pasar dari luar (pengetahuan eksternal) dengan potensi endowment masyarakat hutan. Menurut Kohlin & Amacher (2005), pengentasan kemiskinan yang hanya ditopang dari potensi internal yang berasal dari masyarakat hutan maka akan sulit dilakukan. Menurut Arifudin, et.al (2013), masyarakat hutan kekurangan pioner sebagai panutan, kapasitas SDM komunal yang belum mendukung, dan tata nilai kurang produktif yang sulit dihilangkan.

5. Model Pemberdayaan di Desa Cupak, Kabupaten Jombang

Transisi tingkat pendapatan sebelum tahun 2017 dan setelahnya sebagaimana penjelasan sebelumnya merupakan parameter utama dalam melihat keberhasilan program peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan di Desa Cupak. Setelah tahun 2017, dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat hutan di Desa Cupak dari pihak eksternal dan kemudian sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat hutan. Upaya untuk menghubungkan antara pasar potensial dan potensi endowment di Desa Cupak menjadi fokus utama dari pelaksanaan model pemberdayaan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, potensi di Desa Cupak adalah sebagai pusat budidaya tanaman pandan yang notabene sebagai tanaman produktif sebagai bahan baku kerajinan anyaman pandan.

Sebelum tahun 2017, arus informasi pasar komoditas kerajinan pandan masih dikuasai oleh pengepul lokal (tingkat Dusun) dan pengepul besar (tingkat Desa), sehingga menjadikan rata-rata masyarakat masih kedinginan terhadap informasi pasar potensial. Temuan primer menyimpulkan bahwa persoalan tersebut menjadi faktor utama penyebab karakter masyarakat hutan yang konservatif atau kurang produktif. Kesimpulan tersebut mendukung argumentasi Bowler et al, (2010), bahwa sifat konservatif dari kelompok masyarakat miskin yang terisolasi rata-rata berasal dari arus informasi dari luar yang sangat terbatas. Kasus di Desa Cupak sebelum tahun 2017, keterbatasan sumberdaya manusia sangat

terlihat terutama dari beberapa ciri, seperti: (i) rendahnya tingkat inovasi dan kreatifitas; (ii) jiwa kewirausahaan yang rendah; (iii) kurang oportunistik; dan (iv) kurang ambisius.

Model peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan di Desa Cupak mampu merepresentasikan model penciptaan rantai bisnis yang efisien karena langsung mengkoneksi hasil panen kemudian produksi, dengan akses pasar potensial, baik kepada pelaku industri maupun pihak jasa perdagangan. Model pemberdayaan juga mampu mengoptimalkan potensi pasar kerajinan anyaman pandan yang mempunyai nilai tambah yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan hanya menjual bahan baku daun pandan. Model tersebut dikategorikan sebagai integrasi vertikal, yakni aktivitas yang lebih bersifat terintegrasi yang mencakup dalam kegiatan usahatani atau budidaya panen, pasca panen, pengolahan hasil dalam rangka nilai tambah (*value added*), pemasaran, serta kesatuan manajemen yang terpadu yang didasarkan pada permintaan pasar.

Pengembangan pemasaran anyaman pandan diarahkan pada segmen pasar utama yang memiliki keteraturan dalam sistem transaksi dan jalur distribusi yang relatif pendek. Sedangkan dalam mendorong posisi tawar petani (masyarakat hutan), maka dilakukan melalui pengikutsertaan petani atau masyarakat dalam subsistem industri mulai dari hulu hingga hilir. Alasan kuat mengapa hal ini dapat memperkuat posisi tawar masyarakat adalah karena masyarakat akan langsung terlibat dalam pasar, sehingga arus informasi dan kapasitas rumah tangga menjadi lebih baik. Model ini memberikan inspirasi bahwa pemberdayaan masyarakat hutan mampu dilakukan secara sederhana melalui pengoptimalan potensi lokal (industri anyaman pandan) yang mampu dihubungkan dengan potensi pasar.

Model di Desa Cupak memperkuat temuan Hasman, et.al (2010), bahwa ragam kasus penerapan mekanisme koneksi pasar mampu merubah praktik program pemberdayaan yang minimalis atas struktur sosial patriarki. Kondisi ini telah mengisi kekosongan bentuk program pemberdayaan masyarakat hutan yang ideal, yang selama ini pelaksanaannya masih sangat sentralistis. Model sentralistis diduga menjadi penyebab tingginya deviasi antara program dan penurunan angka kemiskinan. Praktik sentralisasi ini dapat dilihat dari ketiadaan transparansi dan rendahnya partisipasi masyarakat hutan (Lewis, et.al,

2006). Rendahnya tingkat partisipasi anggota menyebabkan organisasi masyarakat tidak mempunyai keunggulan kompetitif, yang dalam kasus Desa Cupak justru mempunyai peran yang sentral sebagai mediator antara hasil panen dan pasar potensial. Kasus di Desa Cupak juga dapat menjawab kelemahan program pengentasan kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh Amin, et.al (2003), bahwa persoalan mendasar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat hutan karena selama ini tidak mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia hutan yang buta akan informasi pasar. Kasus pengentasan kemiskinan di beberapa negara berkembang umumnya sulit melakukan ruang gerak pemberdayaan dan peningkatan partisipasi anggota karena: (i) pelaksanaan program yang dijalankan tidak efisien; (ii) keterbatasan permodalan; dan (iii) sebagian besar tidak memiliki tingkat kewirausahaan yang baik.

Kasus di Desa Cupak juga menguatkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, yang menemukan bahwa praktek-praktek organisasi yang dilakukan atas basis pemberdayaan kelompok terbukti membantu mengubah praktek operasionalisasi kelembagaan masyarakat terpencil menjadi lebih baik. Modal sosial (kelompok) merupakan komponen paling berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi aktif anggota (masyarakat miskin) sehingga berperan dalam menentukan proses pengambilan keputusan dan kinerja organisasi. Pemberdayaan kelompok sangat mempengaruhi sebuah organisasi berbasis kebersamaan (seperti kelompok tani) dalam menetapkan keputusan. Hal ini dilakukan melalui beberapa cara, seperti dalam proses pengambilan keputusan di level kelompok, memecahkan persoalan finansial, membentengi risiko usaha pasca panen, dan memudahkan beban anggota dalam mengambil keputusan bisnis.

Dalam tata kelola di lingkungan masyarakat hutan, proses pemberdayaan dan pembentukan modal sosial merupakan agunan terbaik pengganti modal kapital. Beberapa pendapat mengungkapkan bahwa proses pemberdayaan dan pembentukan modal sosial melalui kelompok masyarakat menjadi pilihan model tata kelola yang tepat daripada strategi tata kelola yang lain. Model tata kelola berbasis pemberdayaan terdiri dari beragam komponen pembentuknya sebagai representasi dari modal sosial, seperti strategi jaringan, kepemimpinan,

dan mutualisme. Beberapa komponen ini merupakan bentuk generik dalam mengorganisir kegiatan ekonomi yang bisa mencakup tata kelola pasar dan pengaturan kelembagaan di level masyarakat sasaran. Oleh karena itu, strategi tata kelola berbasis koneksi pasar yang dikelola kelompok masyarakat sasaran sangat penting dalam memitigasi risiko dari biaya pengorganisasian yang terkait dengan investasi atau spesifikitas aset tertentu. Biaya ini bila tidak diantisipasi akan menjadi lebih berat karena terdapat rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) dalam organisasi, keterbatasan pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan kesulitan mengontrol para pelaku yang mempunyai sifat konservatif.

Kesimpulan penting dari model di Desa Cupak bahwa merubah karakteristik masyarakat hutan yang konservatif sangat efektif dilakukan melalui strategi koneksi pasar yang dikelola secara swadaya dan partisipatif. Proses ini mampu mensimplifikasi konsep pemberdayaan yang umumnya terlalu rumit. Tata kelola yang dilakukan di level petani (masyarakat hutan) untuk mengkoneksikan dengan pasar potensial mampu menjadikan masyarakat hutan mempunyai karakteristik kewirausahaan yang tangguh. Dampak ini mampu dikombinasikan dengan karakter positif masyarakat hutan, yakni tipikal masyarakat yang mempunyai nilai-nilai lokal yang positif dalam melindungi sumberdaya hutan dan menjaga konservasi keanekaragaman hayati.

6. Penutup

Aktivitas mata pencaharian di Desa Cupak sangat unik sebagai sebuah perjalanan transisi karakteristik masyarakat yang mampu merubah kondisi tingkat pendapatan rumah tangga miskin. Dari rangkaian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan di Desa Cupak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: (i) adanya program pemberdayaan yang mampu mengkoneksikan antara sumberdaya lokal dengan pasar potensial; dan (ii) adanya kemampuan untuk mengelola kelembagaan masyarakat hutan. Kedua faktor tersebut berdampak positif dengan perubahan karakter masyarakat hutan yang sebelumnya konservatif menjadi produktif. Hal ini diindikasikan dengan perubahan pola usahatani dan pengolahan industri skala rumah tangga, yang sebelumnya tidak dilakukan oleh masyarakat hutan. Perubahan karakter masyarakat hutan telah

berimplikasi secara positif terhadap peningkatan pendapatan yang diukur dari tingkat pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut, ekstensifikasi budidaya tanaman pandan juga berimplikasi pada luasan konservasi hutan, karena tanaman pandan sangat mengandalkan pohon tegakan (pohon tinggi) sebagai naungan.

Studi kasus di Desa Cupak mampu memberikan inspirasi mengenai model peningkatan kesejahteraan dengan basis pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang unik, mengakomodasi karakter lokal, dan mampu sejalan dengan keberlanjutan sumberdaya hutan. Empirisme di Desa Cupak mampu menjawab beragam persoalan program pengentasan kemiskinan masyarakat hutan, yang selama ini bukan sebagai pihak penerima manfaat atas pengolahan hasil hutan yang eksploitatif. Selama ini, tingginya eksploitasi yang berdampak pada deforestasi sekaligus menjadikan masyarakat sekitar hutan tetap sebagai golongan paling miskin. Kasus di Indonesia, mayoritas masyarakat pedesaan yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara telah dikategorikan sebagai kemiskinan struktural karena pemerintah membatasi akses untuk ikut menggarap lahan kawasan hutan. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang model pemberdayaan masyarakat hutan yang berhasil dalam mewujudkan dua target sekaligus, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kelestarian sumberdaya hutan.

7. Daftar Pustaka

- Amin, S., Ashok S.R., & Giorgio, T. (2003). Does microcredit reach the poor and vulnerable? Evidence from northern Bangladesh. *Journal of Development Economics*, Vol. 70, No. 1, pp. 59-82.
- Ana, M., & Sefa, A. (2012). Microfinance social performance: a global empirical study. *Applied Econometrics and International Development*, Vol. 12, No. 2, pp. 51-68.
- Arifudin' Nasrul, B & Maswadi. (2013). Program of community empowerment prevents forest fires in Indonesian peat land. *Procedia Environmental Science*, Vol. 17, pp. 129-134.
- Bowler, D; Buyung A.L; Healey, J.R; Jones, J.P.G; Knight T; & Pullin, A.S. (2010). The evidence base for community forest management mechanism for supplying global environmental benefits and improving local welfare. *CEE Review*, 08-011.

- Kohlin, Gunnar & Amacher, Gregory. (2005). Welfare implications of community forest plantations in developing countries: the orissa social forestry project. *Amer J. Agr. Econ*, Vol. 87, No. 4, pp. 855-869.
- Lewis, W.G., Pun, K.F., & Lalla, T.R.M., (2006). Exploring Soft Versus Hard Factors for TQM Implementation in Small and Mediumsized Enterprises, International. *Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 55, No. 7, pp. 539-554.
- Rosyidatuzzahro, A., Tjahjanulin, D., & Romy, H. (2019). Community empowerment efforts in provate forest development of malang regency, indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economics Sciences*, Vol. 95, No. 11, pp. 252-256.
- Setiajiati, F., Hendrayanto, H., & Hardjanto, H. (2017). Strategies of community empowerment to manage protection forest sustainably. *Journal of Tropical Forest Management*, Vol. 23, No. 2, pp. 71-80.
- Soepijanto, B; Zauhar, S; Haryono, B.S; Soeaidy, S. (2013). Model of effective community empowerment policy of forestry partnership to forest community in Mesji-Lampung. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 17, No. 1, pp. 07-14.
- Tampubolon, L.A. (2020). Community empowerment in coastal community: a case study of social forestry in north sumatra, indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol.6, No. 1, pp. 58-70.
- WALHI. (2016). WALHI: 608.913 Hektare Lahan Hutan Jatim Kritis Akibat Eksploitasi Tambang (Online), diakses pada tanggal 11 Juni 2017.